



Vol. 3, No. 3, Tahun 2026

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

VOL. 3, NO. 3, TAHUN 2026

HALAMAN : 350-357

**EFEKTIVITAS SISTEM TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM
MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU**

DEA TRISYA MUTI, SYAPRIANTO

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i3.4126>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Dea Trisya Muti, & Syaprianto. (2026). EFEKTIVITAS SISTEM TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU. Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 350-357.
<https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i3.4126>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





EFEKTIVITAS SISTEM TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

**Dea Trisya Muti^{1*},
Syaprianto²**

- 1) Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Riau
- 2) Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Riau

* Email Korespodensi:
deatrisya2003@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 07-01-2026
Diterima : 17-01-2026
Diterbitkan : 19-01-2026

Abstrak

Pelayanan publik yang efektif dan akuntabel merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam administrasi kepegawaian sebagai penggerak utama operasional birokrasi. Kementerian Agama Provinsi Riau telah mengimplementasikan berbagai sistem digital, seperti SIMPEG, SRIKANDI, e-Office, dan absensi online, guna mendukung tertib administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem tata kelola administrasi kepegawaian dalam mendukung pelayanan publik di Kementerian Agama Provinsi Riau. Metode pelaksanaan meliputi pra-observasi, koordinasi dengan unit kepegawaian, observasi langsung, pendampingan administrasi, pencatatan dan dokumentasi kegiatan, serta wawancara informal dengan pegawai. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan dengan cukup baik dan berbasis sistem digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan literasi digital pegawai, sarana prasarana teknologi yang belum optimal, serta ketergantungan pada stabilitas jaringan internet. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan gambaran mengenai faktor pendukung dan penghambat tata kelola administrasi kepegawaian sebagai dasar rekomendasi perbaikan menuju birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pelayanan.

Kata Kunci: pelayanan publik, tata kelola administrasi kepegawaian, e-government, *good governance*, Kementerian Agama Provinsi Riau

Abstract

Effective and accountable public service is an essential prerequisite for realizing good governance, particularly in personnel administration as the main driver of bureaucratic operations. The Ministry of Religious Affairs of Riau Province has implemented various digital systems, such as SIMPEG, SRIKANDI, e-Office, and online attendance, to support orderly administration and improve the quality of public services. This community service activity aims to analyze the effectiveness of the personnel administration governance system in supporting public services at the Ministry of Religious Affairs of Riau Province. The implementation method includes pre-observation, coordination with the personnel unit, direct observation, administrative assistance, documentation of activities, and informal interviews with employees. The results indicate that 4personnel administration governance has been implemented fairly well and is supported by digital-based systems that enhance efficiency, transparency, and administrative accountability. However, several challenges remain, including limited digital literacy among employees, suboptimal technological infrastructure, and dependence on internet network stability.





Overall, this community service activity contributes positively to improving public service quality and provides insights into the supporting and inhibiting factors of personnel administration governance as a basis for recommendations toward a more professional, responsive, and service-oriented bureaucracy.

Keywords: *public service, personnel administration governance, government, good governance, Ministry of Religious Affairs of Riau Province.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang efektif merupakan salah satu indikator utama keberhasilan birokrasi pemerintahan (Amba et al., 2023). Pemanfaatan teknologi informasi, seperti penerapan sistem e-government, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan public (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Dampak dari adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyediakan solusi untuk meningkatkan kinerja layanan publik dengan fokus yang lebih besar pada prinsip *good governance* (Pratiwi et al., 2025). Dalam mewujudkan *good governance* pemerintahan perlu menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan supremasi hukum. *Good governance* tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi juga prasyarat bagi terciptanya kepercayaan publik dan keberlanjutan Pembangunan (Setyasih, 2023). Menurut UNDP (1997) dan World Bank (1992), *good governance* adalah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada keterlibatan publik, keadilan sosial, dan transparansi penggunaan sumber daya negara (Ricky & Rahimallah, 2023). Dalam mewujudkan *good governance* pemerintah dapat mengupayakan hal tersebut melalui optimalisasi dan implementasi *e government* (Ardelia & Yuadi, 2023). Kesiapan dalam hal sumber daya manusia, regulasi, alokasi anggaran, serta infrastruktur fisik dan teknologi menjadi faktor yang sangat penting yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan *e-government* (Muksalmina et al., 2025). Tujuan dari penerapan *e-government* adalah agar institusi pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih unggul (Sugiarti & Akbar, 2024). *E-Government* yang transparan dapat menjadi alat efektif untuk mengawasi pengelolaan dana publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Manuhutu et al., 2025). Dalam konteks ini, diperlukan tekad yang kuat dari pemerintah untuk menggagas dan memulai inovasi dalam administrasi. Pemanfaatan *e-government* dalam lingkungan birokrasi diharapkan mampu menjadi opsi alternatif dalam proses reformasi birokrasi

menuju peningkatan layanan yang lebih baik (Haq et al., 2025). Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 1, bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain (Lestari et al., 2021). Pada organisasi pemerintahan modern, efektivitas pelayanan tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola administrasi kepegawaian sebagai motor penggerak operasional Lembaga (Azhari & Sasongko, 2025).

Penggunaan teknologi informasi ini dapat berupa internet, mobile, komputer, atau lainnya. Sistem ini dibentuk sebagai distribusi layanan yang dibentuk pemerintah dengan bentuk digital. Bentuk usaha dari pemerintah dalam meningkatkan dalam kemajuan dari penerapan *e- government* terjadi pada april 2004, dimana pemerintah mulai mengajukan suatu permohonan untuk seluruh warga negara Indonesia, SIM, nomor pajak, bahkan hingga paspor menggunakan satu nomor identifikasi (Shafira & Kurniasiwati, 2021). Kementerian Agama Provinsi Riau, sebagai institusi yang memiliki mandat strategis dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat, membutuhkan sistem administrasi kepegawaian yang tertata, akuntabel, serta responsif untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan publik. Tata kelola administrasi kepegawaian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari pendataan, pengarsipan, mutasi, kenaikan jabatan, pengelolaan kinerja, hingga pengembangan kompetensi, berjalan sesuai prinsip *good governance* (Malik & Busri, 2023). Efektivitas tata kelola ini berdampak langsung terhadap ketepatan waktu pelayanan, kualitas pengambilan keputusan, serta profesionalisme ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Natika, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama Provinsi Riau telah menerapkan berbagai sistem digital untuk memperkuat administrasi kepegawaian, seperti SIMPEG, SRIKANDI, e-Office, dan absensi online. Sistem tersebut menjadi fondasi transformasi administrasi menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, serta mampu meminimalisasi kendala administratif manual (Rouf & Hariyoko, 2024). Namun demikian, efektivitas implementasi sistem digital ini masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti literasi digital pegawai, kelengkapan data, sarana teknologi informasi, serta kejelasan mekanisme kerja di masing-masing unit (Edison et al., 2023). Melalui berbagai aktivitas tata kelola nyata yang dilakukan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Riau, mulai dari penginputan data pegawai dan siswa belajar luar negeri, penyusunan SK kegiatan (seperti MQKN), pencatatan nomor SPD/SK, penyusunan rekomendasi belajar, pengelolaan data kenaikan jabatan, monitoring absensi digital, hingga penataan dokumen penghargaan Satyalancana, dapat diamati secara langsung bagaimana sistem administrasi kepegawaian dijalankan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung pelayanan publik.

Efektivitas tata kelola administrasi kepegawaian menjadi krusial mengingat administrasi yang tertib, cepat, dan akurat merupakan prasyarat terciptanya birokrasi yang responsive (Salam et al., 2021). Ketidaktepatan data, keterlambatan penyusunan dokumen, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dapat menghambat layanan publik yang menjadi tanggung jawab Lembaga pemerintahan (Putri, 2025). Sebaliknya, tata kelola yang baik akan mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kepastian administrasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Jabar & Frinaldi, 2024). Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem tata kelola administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Provinsi Riau, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai

bagaimana tata kelola kepegawaian berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, serta apa saja aspek yang perlu ditingkatkan demi mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait analisis efektivitas sistem tata kelola administrasi kepegawaian dalam mendukung pelayanan publik di Kementerian Agama Provinsi Riau, kegiatan ini dilaksanakan selama beberapa minggu. Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan pra observasi sebelum kegiatan PKM dilaksanakan. Pra observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal tata kelola administrasi kepegawaian, alur pelayanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Provinsi Riau.
2. Melaksanakan koordinasi dan diskusi awal dengan pihak Unit Kepegawaian Kementerian Agama Provinsi Riau guna menentukan fokus kegiatan PKM, ruang lingkup analisis, serta menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim pelaksana PKM menyusun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pra observasi, yang memuat permasalahan tata kelola administrasi kepegawaian serta upaya analisis dan solusi yang akan dilakukan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Seluruh tim pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui observasi langsung dan pendampingan administrasi kepegawaian. Kegiatan ini meliputi pengenalan struktur organisasi, pembagian tugas, serta proses pelayanan administrasi kepegawaian yang berjalan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Riau.
5. Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan dengan melakukan pencatatan dan dokumentasi proses administrasi kepegawaian, seperti penyusunan Surat Keputusan (SK), pencatatan Surat Perjalanan Dinas (SPD), penginputan data

- pegawai, verifikasi dokumen kenaikan pangkat, serta penggunaan aplikasi digital kepegawaian seperti SIMPEG, SRIKANDI, dan absensi online.
6. Tim pelaksana melakukan pengamatan dan wawancara informal dengan pegawai untuk memperoleh informasi terkait efektivitas penerapan sistem administrasi digital, kendala teknis yang dihadapi, serta persepsi pegawai terhadap sistem tata kelola administrasi kepegawaian yang diterapkan.
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan untuk menilai efektivitas tata kelola administrasi kepegawaian, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
 8. Tim pelaksana menyusun laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memuat hasil analisis efektivitas sistem tata kelola administrasi kepegawaian, serta rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.
 9. Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau, khususnya pada Unit Kepegawaian, selama masa kegiatan magang yang berlangsung pada bulan Juli sampai September 2025. Kegiatan ini diawali dengan penempatan peserta magang pada Senin, 7 Juli 2025, yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja serta sistem administrasi yang berlaku di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pra-observasi dan kegiatan awal yang dilakukan pada 7 Juli 2025, diketahui bahwa tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan dengan mengacu pada sistem kerja yang terstruktur dan berbasis digital. Peserta magang ditempatkan di lingkungan kerja yang berkaitan langsung dengan administrasi dan pelayanan internal, sehingga memperoleh gambaran awal

mengenai alur kerja kepegawaian, pembagian tugas pegawai, serta penggunaan sistem informasi administrasi.

Selanjutnya, pada Selasa, 5 Agustus 2025, kegiatan pengabdian difokuskan pada pembantuan penginputan data siswa yang mendaftar program belajar ke luar negeri melalui aplikasi SRIKANDI. Pada kegiatan ini, peserta magang terlibat langsung dalam proses penginputan dan pengelolaan data administrasi secara digital. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran administrasi serta meningkatkan ketertiban dan transparansi dalam pengelolaan data. Melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI, proses administrasi menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri kembali apabila dibutuhkan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital sangat membantu unit kepegawaian dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi proses manual. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jaringan internet dan keterbatasan perangkat komputer, sehingga pada kondisi tertentu proses penginputan data memerlukan waktu yang lebih lama.

Kegiatan pengabdian berikutnya dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025, dengan fokus pada penyelesaian dan pengecekan data format kepegawaian untuk proses administrasi ASN. Kegiatan ini meliputi pengecekan kesesuaian format dokumen, kelengkapan data, serta penyesuaian dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Melalui kegiatan ini, terlihat bahwa unit kepegawaian memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap ketertiban dan akuntabilitas administrasi, di mana setiap dokumen diperiksa secara cermat sebelum diproses lebih lanjut.

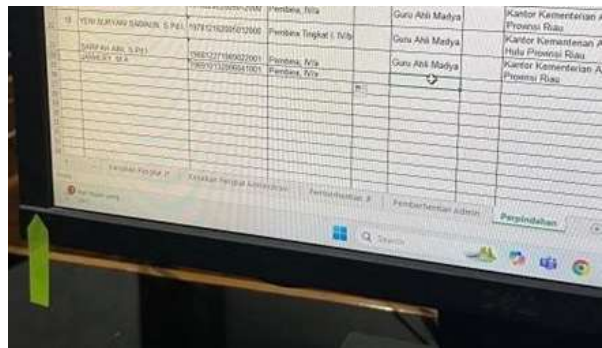
Selama kegiatan berlangsung, responsivitas pegawai unit kepegawaian juga terlihat cukup baik. Pegawai memberikan arahan dan pendampingan dalam pelaksanaan tugas administrasi, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, beban kerja pegawai yang cukup tinggi pada waktu-waktu

tertentu menyebabkan proses administrasi belum sepenuhnya optimal.

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui pendampingan administrasi kepegawaian ini menunjukkan bahwa tata kelola administrasi di Kementerian Agama Provinsi Riau telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan publik. Pemanfaatan sistem digital seperti SRIKANDI mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas yang lebih optimal, masih diperlukan peningkatan sarana prasarana teknologi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.



Gambar 1. Penginputan data siswa yang mendaftarkan program belajar ke luar negeri melalui aplikasi SRIKANDI



Gambar 2. Penyelesaian data format kepegawaian untuk proses kenaikan jabatan ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau

Berdasarkan dokumentasi kegiatan yang ditampilkan pada Gambar 1 dan Gambar 2, dapat dilihat bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui

pendampingan administrasi kepegawaian di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau berjalan dengan baik. Kegiatan penginputan data siswa melalui aplikasi SRIKANDI serta penyelesaian data format kepegawaian ASN menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam mendukung tertib administrasi dan kelancaran pelayanan internal. Melalui kegiatan ini, proses administrasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu membantu unit kepegawaian dalam meningkatkan efektivitas kerja serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional.

KESIMPULAN

Pengabdian mengenai Efektivitas Sistem Tata Kelola Administrasi Kepegawaian dalam Mendukung Pelayanan Publik di Kementerian Agama Provinsi Riau menunjukkan bahwa tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan instansi tersebut telah berjalan dengan baik dan berada pada arah yang semakin profesional melalui pemanfaatan teknologi digital. Implementasi aplikasi seperti SIMPEG, SRIKANDI, e-Office, dan absensi online berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses administrasi. Aktivitas administrasi yang dilakukan, mulai dari penginputan data, pencatatan dokumen resmi, penyusunan SK, verifikasi kenaikan jabatan, hingga pengelolaan arsip digital, memperlihatkan bahwa mekanisme kerja telah terstruktur dengan jelas dan didukung oleh sistem yang memadai.

Meskipun demikian, efektivitas tata kelola belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemukan, seperti keterbatasan literasi digital pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi yang belum merata, ketergantungan pada stabilitas jaringan internet, serta beban kerja pegawai yang cukup tinggi, masih menjadi faktor penghambat peningkatan kualitas layanan. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM serta penambahan infrastruktur pendukung agar tata kelola administrasi dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

Secara umum, tata kelola administrasi kepegawaian di Kementerian Agama Provinsi Riau telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, khususnya dalam meningkatkan kecepatan layanan, ketertiban arsip, kemudahan akses informasi, serta peningkatan kepastian prosedur administrasi. Dengan melakukan penguatan pada aspek yang masih menjadi hambatan, tata kelola administrasi kepegawaian berpotensi menjadi lebih efektif dan mampu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan sehingga pengabdian mengenai tata kelola administrasi kepegawaian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pegawai Unit Kepegawaian yang telah membantu memberikan informasi, bimbingan, dan arahan selama proses pengumpulan data. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak kampus dan dosen pembimbing yang telah mendukung penyusunan laporan ini sehingga dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amba, N., Saleky, S. R. J., & Sahertian, O. L. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *JURNAL ADMINISTRASI TERAPAN*, 2(1), 232–239.
- Ardelia, S. I. M., & Yuadi, I. (2023). Digital Government Dalam Menciptakan Transparansi Pelayanan Publik: Suatu Analisis berdasarkan Perspektif Bibliometrik. *Tibannbaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937>
- Azhari, L., & Sasongko, R. W. (2025). Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Edison, I. A., Valentina, I. R., & Ariati, P. (2023). Efektivitas Pelayanan Pemerintah dengan Implementasi Layanan Berbasis Digital Pada Aplikasi SI-ALEK di Kecamatan Lubuk Begalung Padang Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7, 29947–29952.
- Haq, D., Dwi, A., & Hayat. (2025). PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DI DESA DALISODO KEC. WAGIR KABUPATEN MALANG BERBASIS GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 06(08).
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728.
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Dwi, R. C., & Tresiana, N. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (E-GOVERNMENT) DI ERA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 212–224.
- Malik, I., & Busri, N. wahid. (2023). Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 85–119. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>
- Manuhutu, M. A., Ferdinandus, W., & Uktolseja, L. J. (2025). Rancang Bangun E-Government: Transparansi dan Pelayanan Publik. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 3571–3579.
- Muksalmina, Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur. (2025). Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2).
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK

- KABUPATEN SUMEDANG). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 101–112.
- Natika, L. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>
- Pratiwi, S. W., Wilujeng, F. A., & Wicitra, J. S. (2025). Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Penataran. (Konstitusi) *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4).
- Putri, M. A. (2025). Strategi Pengelolaan Kebijakan untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Kota Bengkulu. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1).
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Rouf, A., & Hariyoko, Y. (2024). EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PROGRAM KALIMASADA DI KELURAHAN SUKOLILO BARU. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(01), 73–78.
- Salam, R., Akib, H., Arsalan, S., Makassar, U. N., Pettarani Makassar, J. A. P., Pelatihan, P., Pengembangan, D., Kajian, D., Pemerintahan, M., Ri, L., Raya Baruga, J., & 48 Makassar, N. (2021). Fungsi Administrasi Perkantoran Modern dalam Mendukung Pelaksanaan Organisasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 79–94. <https://doi.org/10.52316/JAP.V17I1.57>
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–62.
- Shafira, A., & Kurniasiwati, A. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN KULON PROGO. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 52–68.
- Sugiarti, R., & Akbar, L. R. (2024). The Effect of E-Government on Corruption-International Evidence. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 165–176. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i2.324>